DEWANPERS

LAPORAN

Kunjungan Kerja Dinas Luar Negeri
Paris-Prancis, 22-28 November 2022

Sekretariat: Gedung Dewan Pers Lantai 7-8
Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110 Telp.021-3521488, 3504877, 3504874-75 Faks.021-3452030 Website: www.dewanpers.or.id Email: sekretariat@dewanpers.or.id

Draft 5 Des 2022/ 10.24

Pengantar

Indeks Kemerdekaan Pers nasional terus memperlihatkan kenaikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, IKP nasional mencapai angka 77,88. Angka ini merupakan peningkatan 1,86 poin dari tahun 2021.

Dari satu sisi, tentu saja kenaikan IKP ini patut disambut gembira. Hasil IKP tersebut menggambarkan, bahwa kemerdekaan pers secara nasional berada dalam kondisi cukup bebas. Akan tetapi kenyataan itu tidaklah cukup untuk membuat semua komponen pers nasional berbangga diri. Terdapat fakta lain yang membuat pers nasional harus memperjuangkan kemerdekaan pers lebih jauh lagi.

Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers pada 2021 memperlihatkan masih cukup banyaknya kekerasan yang dialami oleh insan pers. Sepanjang tahun 2021, LBH Pers menemukan kekerasan terhadap jurnalis di 19 provinsi dengan total jumlah mencapai 55 kasus. Hal itu belum termasuk kekerasan nonfisik yang belakangan juga dialami awak media, misalnya peretasan akun media sosial mereka oleh pihak lain yang diduga kuat terkait dengan aparat negara.

Dengan kondisi seperti itu, mau tidak mau membuat Dewan Pers yang selama ini menjalankan fungsi untuk mengembangkan kemerdekaan pers serta meningkatkan kehidupan pers nasional harus memainkan peran lebih aktif dan nyata bagi ekosistem pers nasional yang sehat. Upaya Dewan Pers untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak luar harus kian ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Peningkatan peran Dewan Pers itu bisa dijalankan dengan melakukan perlindungan, advokasi, atau dukungan terhadap insan pers yang mengalami kasus-kasus kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Aneka pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran wartawan atas segala aturan yang mendukung kinerja mereka juga perlu terus kian digalakkan.

Tuntutan agar semakin besarnya pengaruh Dewan Pers dalam lingkup global juga menjadi sebuah keniscayaan. Dengan peran Dewan Pers yang semakin besar, maka dampaknya akan punya pengaruh lebih kuat lagi dalam mengawal kemerdekaan pers nasional bersama para konstituen.

Dalam upaya itu pulalah Dewan Pers menghadiri undangan sebagai peninjau (observer) dari rapat ke-33 *The Intergovernmental Council of The International Programme For The Development of Communication (IPDC)* pada 24-25 November di kantor pusat UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) di Paris, Prancis. Dengan menjadi saksi langsung dalam sidang IPDC diharapkan Dewan Pers bisa lebih dikenal di kancah internasional dan dapat memahami proses pengambilan keputusan penting pada organisasi tersebut.

Harapan atas kiprah yang lebih besar bisa terwujud jika Dewan Pers dapat menjadi anggota Dewan IPDC untuk menggantikan Malaysia yang masa keanggotannya akan segera habis. Malaysia yang belum memiliki semacam Dewan Pers ternyata malah sudah menjadi anggota Dewan IPDC. Untuk itu, peran pemerintah dibutuhkan –dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (terutama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik)- agar mengusulkan ke Kementerian Luar Negeri untuk mengajukan Indonesia sebagai anggota Dewan IPDC.

Peran optimal Dewan Pers di ekosistem pers internasional dan besarnya perhatian serta kepedulian atas kondisi pers nasional, diharapkan bisa membawa peningkatan positif bagi kehidupan pers secara umum. Harapan ini juga telah tercantum dalam laporan Kunjungan Kerja Dinas Luar Negeri Dewan Pers di Paris 22-28 November 2022. Paparan laporan ini juga menyertakan agenda kerja kunjungan, latar belakang rapat IPDC, pelaksanaan program, agenda pleno IPDC, target rencana kerja, laporan dirjen UNESCO dan rencana aksi PBB tentang keselamatan kerja jurnalis dan soal imunitas, dan sebagainya.

Mudah-mudahan laporan ini memberi manfaat dan gambaran tentang isu global penting yang melingkupi dunia jurnalistik. Berikut ini isi laporan lengkap kunjungan Dewan Pees tersebut.

Agenda Kerja Delegasi Dewan Pers;

A. Menghadiri undangan sebagai observer pada Rapat ke *33rd, the Intergovernmental Council of The International Programme For The Development of Communication (IPDC),* yang diadakan dari 24 hingga 25 November 2022 di kantor pusat UNESCO
B. Audiensi dengan Duta Besar LBBP RI untuk Prancis, Andorra, Monako/Wakil Tetap RI untuk UNESCO dengan agenda, update perkembangan kemerdekaan pers Indonesia serta koordinasi tindak lanjut penanganan kasus kekerasan pada wartawan di kantor KBRI Paris dan Perwakilan Tetap RI untuk UNESCO

A. Laporan observer pada Rapat ke *33rd, the Intergovernmental Council of The International Programme For The Development of Communication (IPDC),* yang diadakan dari 24 hingga 25 November 2022 di kantor pusat UNESCO

Latar Belakang

IPDC merupakan forum multilateral dibawah PBB yang ditujukan untuk memobilisasi masyarakat internasional dalam membahas dan mempromosikan pengembangan media di negara-negara berkembang. Program ini memberikan dukungan untuk media dalam mencari kesepakatan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan media yang bebas dan majemuk di negara-negara berkembang.

Negara Anggota Dewan dalam IPDC bertanggung jawab untuk:

1. Pembuatan kebijakan, memandu perencanaan dan pelaksanaan program;
2. Menyetujui prioritas program;
3. Meninjau dan menilai pencapaian berdasarkan laporan implementasi dan evaluasi proyek dan menentukan bidang dasar yang memerlukan peningkatan kerjasama internasional;
4. Meninjau cara dan sarana dari negara anggota agar dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam Program Internasional untuk Pengembangan Komunikasi;
5. Menyetujui sistem pembiayaan yang sesuai untuk program guna mengamankan sumber daya yang diperlukan untuk kepentingan mereka yang meminta bantuan dari Program.

Negara Anggota Dewan dalam IPDC biasanya bertemu dalam sesi pleno reguler setiap dua tahun sekali.

Tentang Pelaksanaan Program:

Tahun 2022 merupakan Rapat Pleno Dewan yang ke 33. Dewan Pers Republik Indoneisa hadir dalam sidang dewan IPDC ke 33 sebagai Observer, sesuai dengan Surat Undangan Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65420/A1.A6/KS.09.00/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Penyampaian Undangan *33rd session of the Intergovernmental Council of The International Programme For The Development of Communication (IPDC),* yang diadakan dari 24 hingga 25 November 2022 di Ruang X, Markas Besar UNESCO, Pasris.

Delegasi Indonesia sebagai Observer;
Bertindak sebagai observer, Delegasi Dewan Pers Republik Indonesia terdiri dari:

1. Muhamad Agung Dharmajaya, Plt. Ketua Dewan Pers
2. Totok Suryanto, Anggota Dewan Pers
3. Yadi Heriyadi Hendriana, Anggota Dewan Pers
4. Arif Zulkifli, Anggota Dewan Pers
5. Atmaji Sapto Anggoro, Anggota Dewan Pers
6. P Tri Agung Kristanto, Anggota Dewan Pers
7. Ninik Rahayu, Anggota Dewan Pers
8. Wawan Agus Prasetyo,Analis Kepegawaian Muda, Sekretariat Dewan Pers

Yang dalam pelaksanaannya juga didampingi oleh Tim KBRI Paris

Agenda Pleno ke 33 IPDC 2022:

1. Pembukaan sidang oleh Ketua IPDC Intergovernmental Council
2. Adopsi agenda dan pengaturan kerja sesi rapat pleno
3. Adopsi draf laporan akhir sesi ke-32 Dewan IPDC
4. Laporan Ketua tentang kegiatan Biro sejak sidang ke-32
5. Laporan Dirjen tentang kegiatan IPDC sejak sesi ke-32, dilanjutkan dengan diskusi dan keputusan
6. Rancangan kerangka kerja strategis untuk IPDC, dilanjutkan pembahasan dan keputusan
7. Visibilitas dan Penggalangan Dana untuk IPDC
8. Laporan Direktur Jenderal tentang Keselamatan Jurnalis dan Bahaya Impunitas, dan Rencana Aksi PBB tentang Keselamatan Jurnalis dan Masalah Impunitas, diikuti dengan diskusi dan keputusan.
9. Laporan Global Implementasi Undang-Undang Akses Informasi, diikuti oleh diskusi dan keputusan
10. Prinsip Dukungan Efektif untuk Sektor Media, dilanjutkan diskusi dan keputusan
11. Bisnis lainnya
12. Penutupan sesi

Laporan Catatan Sesi Acara

Laporan Direktur Jenderal tentang kegiatan IPDC sejak siding Dewan ke 32

- IPDC menjalankan semua aspek pengembangan media, meliputi: penelitian, peningkatan kesadaran, pemantauan, penetapan standar, dan implementasi proyek.
- IPDC menyelengarakan forum-forum khusus untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan dialog antar pemerintah dan untuk mendukung tren dan dinamika nasional, regional, dan global seputar media dan perkembangan komunikasi
- Pengesahan standar dan proyek oleh Dewan IPDC dilaksanakan secara seksama, menjunjung tinggi netralitas dan ketidakberpihakan.
- Negara-negara Anggota dan lembaga media didorong untuk memperkuat pengembangan media dan pluralism media, termasuk melalui Program IPDC**.**

Keputusan Dewan Anggota IPDC, Menyetujui laporan akhir sesi ke-32 Dewan IPDC

Target Rencana Kerja

Indikator keluaran 1.
Proyek pengembangan media dilaksanakan oleh organisasi akar rumput untuk mempromosikan pers yang plural, aman, serta mandiri, termasuk melalui pembangunan kapasitas, reformasi hukum, penelitian, dan kolaisi/akolaborasi.

Indikator Keluaran 2.
Kapasitas pengemban tugas diperkuat untuk memantau dan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan SDG 16.10.1 (keselamatan wartawan) dan SDG 16.10.2 (akses ke informasi), melalui pemantauan & mekanisme pelaporan aktif, atas keselamatan wartawan dan bahaya dari impunitas,

Indikator Keluaran 3.
Pemberdayaan lembaga pendidikan jurnalistik untuk menyediakan program pendidikan jurnalistik dan gender, menggunakan alat, sarana dan sumber daya yang dimiliki dan diproduksi oleh UNESCO/IPDC.

IPDC bertindak sebagai laboratorium pengembangan ide/gagasan atas masalah dan kebijakan media yang sedang berkembang.
Beberapa materi lain yang disampaikan:

1. Laporan Perkembangan dukungan anggaran dari negara-negara Anggota Dewan IPDC.
2. Laporan implementasi project dari total anggaran yang dikelola.

Berdasarkan pembahasan Intergovernmental Council of IPDC, diputuskan beberapa hal;

1. Mencatat laporan ringkas Direktur Jenderal IPDC tentang kegiatan IPDC serta laporan rinci berbasis hasil yang disampaikan kepada Biro IPDC tentang kegiatan IPDC sejak sesi ke-32;
2. Mendorong keterlibatan berkelanjutan para anggota IPDC, sejalan dengan Prioritas IPDC, dalam pelaksanaan Agenda 2030, untuk pembangunan berkelanjutan serta dalam implementasi agenda bersama Sekretaris Jenderal PBB;
3. Memberikan apresiasi kepada Biro dan Sekretariat (IPDC) atas terselenggaranya keputusan Dewan pada sesi ke-32 dan untuk pengaktifan “mekanisme respon cepat”yang memberikan dukungan untuk mengembangkan media pada negara-negara yang sedang konflik dan krisis, termasuk dalam konteks krisis COVID-19;
4. Menyambut baik sinergi yang dimungkinkan oleh kerja sama intrasektoral antara IPDC dan bagian lain dari Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Menyambut keterlibatan IPDC dengan tantangan saat ini, termasuk kelayakan media, promosi transparansi internet, dan kontribusi untuk peringatan 10 tahun Rencana Aksi PBB tentang Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas;
6. Menyambut baik upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Sekretariat untuk meningkatkan kualitas dan distribusi geografis proyek untuk diserahkan ke Biro IPDC, serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam desain dan pelaksanaan proyek;
7. Terima kasih kepada para donatur yang telah berkontribusi pada IPDC dan menyambut baik perluasan basis donatur IPDC;

8. Mendorong negara anggota untuk terus memberikan kontribusi/dukungan keuangan untuk mendukung IPDC

Laporan Direktur Jenderal tentang Keselamatan Jurnalis dan Bahaya Impunitas dan Rencana Aksi PBB tentang Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas.

Dalam rapat tersebut, Anggota Dewan IPDC, telah memutusakan;

1. Menerima laporan dua tahunan yang kedelapan tentang Keselamatan Wartawan dan Bahaya Impunitas,
2. Mengingat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 19 dan 29, dan Internasional Kovenan Hak Sipil dan Politik, Pasal 19,
3. Mengingat Resolusi General Conference ke-29 29 "Kecaman atas kekerasan terhadap jurnalis"("Condemnation of violence against journalists") (1997), yang menjadi dasar, Direktur Jenderal untuk mengutuk pembunuhan dan kekerasa fisik apapun terhadap jurnalis sebagai kejahatan terhadap publik/masyarakat,
4. Mengingat bahwa sejak keputusan tentang keselamatan jurnalis yang diadopsi oleh Dewan IPDC pada Sesi ke-32 (2020), sudah ada Resolusi Majelis Umum PBBA/RES/76/173 (2021); dan Keputusan Dewan Eksekutif UNESCO 211 EX/5.I.G (2021) tentang keamanan jurnalis dan isu impunitas; serta Resolusi Dewan HAMA/HRC/RES/47/16 (2021) tentang pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di dunia digital, A/HRC/RES/48/4 (2021) tentang hak privasi di era digital, A/HRC/RES/50/15 (2022) tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dan A/HRC/RES/51/9 (2022) tentang keselamatan jurnalis,
5. Mendukung peran UNESCO dalam memimpin pelaksanaan Rencana Aksi PBB dalam isu Keselamatan Wartawan dan Impunitas.
6. Mendukung diselenggarakannya Konferensi Dies Natalis ke-10 di Wina, Austria. Perihal Rencana Aksi PBB tentang Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas, berdasarkan cakupan yang luas dan memiliki signifikansi positif untuk implementasi lebih lanjut dari Rencana dan Peran UNESCO sebagai koordinatornya.
7. Mengetahui Laporan Dirjen tentang Keselamatan Wartawan dan Bahaya Impunitas, yang telah diakui oleh Komisi Statistik PBB sebagai kontribusi terhadap tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 16, Target 10, dan sebagai salah satu sumber daya untuk memantau keamanan jurnalis dan bahaya impunitas.
8. Mencatat pentingnya Voluntary National Reports (VNRs) pada SDG 16 serta menyertakan analisis berdasarkan indikator 16.10.1 (Jumlah kasus pembunuhan, penculikan, penghilangan paksa, penahanan yang sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, pekerja media, anggota serikat pekerja, dan advokasi HAM dalam periode 12 bulan sebelumnya), untuk mengidentifikasi tren yang berkaitan dengan "akses publik terhadap kebebasan informasi dan kemerdekaan dasar" (SDG 16.10),
9. Mendukung laporan global UNESCO, *"Global Report on World Trends in Freedom of Expression and Media Development (2021/2022)*", termasuk bagian "Ancaman yang didiamkan: Tren Keamanan Wartawan"; dan pembahasan tentang keselamatan jurnalis pada Konferensi Hari Kebebasan Pers Dunia 2022 yang diadakan di Punta del Este, Uruguay, dengan tema "Jurnalisme di bawah pengepungan digital",
10. Menyambut baik sikap IPDC dalam mendukung proyek-proyek yang bertujuan memperkuat hukum nasional, penyusunan kerangka kerja dan peningkatan kapasitas untuk melindungi jurnalis dan memantau serta melaporkan keselamatan mereka,

memberdayakan aktor lokal untuk menggunakan indikator SDG 16.10.1 untuk mengukur kemajuan menuju SDG 16, serta upaya IPDC yang ditujukan untuk mewujudkan akses yang lebih baik ke basis data tentang serangan terhadap jurnalis, dan dukungan IPDC (sejak 2009), terhadap 161 proyek yang dilaksanakan oleh organisasi lokal melalui siklus proyek tahunan IPDC yang bertujuan untuk mempromosikan keselamatan pers,

11. Memberikan perhatian serius pada tingginya tingkat pembunuhan - meskipun dengan tingkat yang lebih rendah dari tahun 2021. Dewan IPDC sangat prihatin dengan luasnya ancaman yang dihadapi oleh wartawan dalam menjalankan profesinya, (online dan offline), meningkatnya pelecehan online terhadap jurnalis, termasuk peningkatan kekerasan pada jurnalis perempuan seperti tercatat pada tahun 2021, pelecehan hukum dan upaya hukum yang tidak proporsional, pembatasan terhadap jurnalis, termasuk yang diberlakukan dalam konteks pandemi Covid-19 juga sebagai jurnalis yang dipindahkan secara internal atau eksternal karena ancaman terhadap mereka,
12. Dewan IPDC menyampaikan keprihatinaan atas meningkatnya persentase wartawan yang tewas di luar wilayah konflik bersenjata, dalam beberapa tahun terakhir, banyak di antaranya bekerja pada isu-isu yang berkaitan dengan korupsi, perdagangan manusia, pelanggaran hak asasi manusia, masalah lingkungan dan kesalahan politik, di sisi lain, wartawan terus menghadapi risiko besar di zona konflik bersenjata,
13. Prihatin dengan menurunnya respon Negara Anggota terhadap permintaan informasi Direktur Jenderal tentang tindak lanjut yudisial atas kasus pembunuhan jurnalis, dibandingkan dengan tahun 2020, dan tetap sangat prihatin dengan tingginya tingkat impunitas bagi para pelaku, serta efek mengerikan yang mungkin terjadi pada kebebasan berekspresi yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap hukum.
14. Menyambut baik informasi yang diberikan oleh Negara Anggota tentang langkah-langkah positif yang diambil dalam mengatasi keamanan jurnalis dan impunitas, termasuk tindakan yang diambil untuk memantau dan menangani risiko khusus gender, sebagai tindak lanjut Keputusan Dewan IPDC 2020 tentang Keamanan Wartawan,
15. Menghargai kontribusi penting organisasi kolega, terhadap Keselamatan Wartawan di tingkat antar pemerintah di Paris, New York, Jenewa, Wina dan Strasbourg, dan baru-baru ini atas pembentukan kolega organisasi di Negara-negara Amerika (OAS),dan mendorong agar kelompok serupa dibuat di organisasi antar pemerintah lain yang relevan,
16. Menyambut Pernyataan Bersama Para Presiden Majelis Umum PBB, UNESCO Konferensi Umum dan Dewan Hak Asasi Manusia tentang Keselamatan Wartawan pada Konferensi Global Hari Kebebasan Pers Sedunia 2022; dan upaya UNESCO untuk meningkatkan potensi proses Universal Periodic Review (UPR) dalam memperkuat keselamatan jurnalis dengan mendukung kapasitas Koordinator Residen PBB dan Tim Negara, sektor media, sumber daya manusia nasional lembaga hak asasi manusia, masyarakat sipil dan perwakilan tetap serta delegasi dalam memberikan kontribusi pada UPR,
17. Menerima Laporan Khusus PBB Tahun 2022 tentang Pemajuan dan Perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi “Memperkuat kebebasan media dan keamanan jurnalis di era digital”, serta fokusnya pada upaya memerangi kekerasan terhadap jurnalis wanita baik secara online dan offline, terakhir juga ditekankan dalam makalah diskusi UNESCO tahun 2021 “The Chilling: Tren global dalam kekerasan online terhadap jurnalis perempuan”,
18. Menyambut baik upaya UNESCO dalam membina kerja sama melalui Massive Open Online Courses dan prakarsa pelatihan lainnya dengan pengadilan HAM regional,

Asosiasi Polisi Internasional, Asosiasi Penuntut Internasional dan aktor regional dan nasional lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kebebasan berekspresi dan keamanan jurnalis,

19. Menekankan relevansi berkelanjutan dari keputusan tentang Keselamatan Wartawan dan Isu Impunitas yang diadopsi dalam sesi Dewan Antarpemerintah IPDC sebelumnya, yang mendesak Negara Anggota untuk terus memberikan update kepada Direktur Jenderal UNESCO, secara sukarela, berdasarkan status penyelidikan yudisial yang dilakukan pada setiap pembunuhan yang dikutuk oleh Direktur Jenderal"::
    a. Menghargai upaya negara-negara Anggota yang telah memberikan update informasi kepada Direktur Jenderal tentang status penyelidikan yudisial atas pembunuhan jurnalis; dan mendorong Negara Anggota yang belum menjawab permintaan Direktur Jenderal untuk memberikan informasi tersebut kepada UNESCO, secara sukarela;CI-22.
    b. Meminta Negara-negara Anggota, atas dasar sukarela, untuk memberi wewenang kepada UNESCO dalam membuat informasi tentang tindak lanjut yudisial dapat diakses dan tersedia untuk umum di halaman web khusus UNESCO, untuk tujuan transparansi, sejalan dengan Keputusan sebelumnya tentang Keselamatan Wartawan dan Isu Impunitas yang diadopsi oleh Dewan Antarpemerintah IPDC;
    c. Meminta Dirjen UNESCO untuk terus memberikan laporan analitis kepada Dewan Intergovernmental IPDC, tentang pembunuhan wartawan, pekerja media dan produsen media sosial yang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan Surat kecaman Direktur Jenderal, termasuk informasi tentang penyelidikan yudisial yang didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Negara Anggota secara sukarela;
    d. Merekomendasikan Direktur Jenderal untuk memberikan lebih banyak informasi tentang serangan tanpa kekerasan (non lethal attack) pada jurnalis dalam laporannya, sejalan dengan sinergi metodologi UPR dan pelaporan SDG 16.10.1;
    e. Dengan mempertimbangkan perkembangan laporan analitis terkini dari Direktur Jenderal, termasuk informasi yang diberikan tentang tindakan yang diambil oleh Negara Anggota untuk mempromosikan keselamatan jurnalis dan fokus pada risiko spesifik gender, mengundang Direktur Jenderal untuk secara resmi menginformasikan mitra yang relevan tentang publikasi laporan tersebut, termasuk semua pemangku kepentingan Rencana Aksi Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas di PBB ;
    f. Mendorong UNESCO untuk terus mendukung negara anggota dalam mekanisme pemantauan dan pelaporan keamanan jurnalis dan masalah impunitas, baik dalam situasi non-konflik maupun konflik, dan untuk mempromosikan pendekatan peka gender di seluruh aspek; serta melanjutkan upaya untuk memperkuat transparansi platform internet sehubungan dengan serangan dan ancaman online terhadap jurnalis, termasuk serangan berbasis gender;
    g. Menegaskan kembali seruan kepada Negara-negara Anggota yang belum menjalankannya, untuk menunjuk titik fokus pada masalah keamanan jurnalis dan impunitas, dengan kewenangan untuk mengkoordinasikan pemantauan keselamatan jurnalis sebagai bagian dari pemenuhan SDG 16, Target 10 Negara Anggota, berhubungan dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk Negara Anggota lainnya, organisasi multilateral, organisasi regional, media dan masyarakat sipil tentang isu-isu keselamatan jurnalis, dan untuk melaporkan secara nasional dan internasional melalui saluran yang sesuai, termasuk SDG

yang relevan dan proses badan hak asasi manusia PBB, dan bekerja sama dengan pihak berwajib nasional yang relevan;

h. Mendorong Negara Anggota untuk meningkatkan kapasitas lembaga pelatihan peradilan nasional, kejaksaan dan lembaga penegak hukum dan untuk mempertimbangkan penggunaan sumber daya pengetahuan yang ada pada UNESCO, dalam menangani impunitas dan keamanan jurnalis;
i. Menyerukan Negara-negara Anggota untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi jurnalis dan pekerja media dari tuntutan hukum strategis, jika perlu, termasuk dengan mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang mencegah dan/atau meringankan kasus tersebut dan memberikan dukungan kepada korban;
j. Mengundang UNESCO untuk terus mendukung Negara Anggota dalam upaya memperkuat kerangka hukum nasional dalam upaya perlindungan jurnalis berdasarkan standar internasional dan praktik terbaik;
k. Mengundang Biro Dewan Antarpemerintah IPDC untuk terus mendukung proyek yang memajukan tujuan Rencana Aksi PBB tentang Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas, termasuk kegiatan-kegiatan yang menangani ancaman-ancaman spesifik yang dihadapi jurnalis perempuan, sejalan dengan prioritas global UNESCO kesetaraan gender dan sesuai dengan resolusi 41 C/38 yang diadopsi oleh General Conference;
l. Mendesak Direktur Jenderal dan Negara Anggota untuk meningkatkan upaya mereka dalam memobilisasi dana tambahan di luar anggaran untuk pekerjaan UNESCO di bidang keselamatan jurnalis dan masalah impunitas.

Prinsip Dukungan Efektif untuk Sektor Media

Keputusan Pleno Dewan Council IPDC:

1. Menyambut baik kemungkinan seperangkat prinsip yang tidak mengikat untuk memberikan dukungan yang efektif terhadap jurnalisme dan media;
2. Meminta Sekretariat IPDC untuk melapor kembali pada rapat Biro ke-67 tahun 2023 dan pada Sidang Dewan ke-34 tahun 2024 tentang pengembangan lebih lanjut dari prinsip-prinsip tersebut termasuk keterlibatan, dan implikasi untuk, IPDC.

Visibilitas dan Penggalangan Dana untuk IPDC

Keputusan Dewan IPDC, merujuk Statuta IPDC,

1. Mendukung pengembangan dan pelaksanaan aksi penggalangan dana untuk kepentingan IPDC,bekerja sama dengan BSP dan sesuai dengan keseluruhan sumber daya strategi mobilisasi UNESCO ;
2. Mendukung keberadaan IPDC sebagai pengembang media, termasuk kontribusinya terhadap tujuan SDG, peran fungsinya dalam isu kelayakan media, dan dalam kaitannya dengan tata kelola digital dan isu-isu lain yang muncul;
3. Menghimbau Negara Anggota untuk memastikan pendanaan yang memadai agar IPDC dapat terus menjalankan misi pentingnya untuk mendukung kebebasan, kemandirian dan

kemajemukan media di negara berkembang, negara dalam transisi, dan negara dalam konflik, pasca konflik dan situasi pascabencana dengan memperhatikan prioritas global UNESCO Afrika dan Kesetaraan Gender dan kelompok prioritas SIDS dan pemuda;

4. Meminta Sekretariat IPDC, dengan dukungan Ketua dan Biro/Dewan terkait anggota, untuk terus mendekati calon donor swasta, yayasan dan perusahaan yang mungkin tertarik untuk mendanai pengembangan media yang sejalan dengan prioritas IPDC;
5. Menyambut baik peningkatan proporsi pendanaan *non-earmarked* untuk Program, dan mendorong donor IPDC untuk melanjutkan tren ini dan mempertimbangkan komitmen dukungan keuangan multi-tahun terhadap Program;
6. Mendorong Sekretariat IPDC untuk terus memperkuat visibility inisiatif IPDC dan terus meningkatkan sumber daya dan aktivitas komunikasi, online dan offline;
7. Meminta Sekretariat IPDC untuk melaporkan hal tersebut di atas pada sesi ke-34 Dewan IPDC (November 2024)

B. Laporan hasil audiensi dengan Wakil Duta Besar LBBP RI untuk Prancis, Andorra, Monako/Wakil Tetap RI untuk UNESCO dengan agenda, update perkembangan kemerdekaan pers Indonesia serta koordinasi tindaklanjut penanganan kasus kekerasan pada wartawan, di kantor KBRI Paris dan Perwakilan Tetap RI untuk UNESCO.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Paris, Dewan Pers mengajukan audiensi dengan Duta Besar LBBP RI untuk Perancis, Andorra, Monako / Wakil tetap RI untuk UNESCO, yang diterima oleh Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Prof. Ismunandar. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa isu, antara lain;

1. Delegasi Dewan Pers, menyerahkan laporan hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia, tahun 2022.
2. Dialog pembahasan data dan informasi perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia
3. Potensi rekomendasi Indonesia sebagai Negara Member IPDC pada pemilihan tahun 2023, menggantikan Malaysia yang akan habis masa periode keanggotaannya.

Rencana tindak lanjut Dewan Pers:

1. Dalam upaya mendukung tersedianya data sumber dan pemantauan penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia, Dewan Pers akan menginisiasi pengembangan sistem informasi dan data base penanganan kekerasan terhadap wartawan yang melibatkan semua stakeholder (konstituen Dewan Pers dan penegak hukum)
2. Dalam mengupayakan pengembangan pers di Indonesia, Dewan Pers akan merekomendasikan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, sebagai Focal Poin di Bidang Komunikasi dan Informatika mengusulkan kepada Kementerian Luar Negeri untuk mengajukan Indonesia pada Sidang IPDC selanjutnya, untuk menduduki Kursi Dewan IPDC, menggantikan Malaysia yang telah habis periodesasi keanggotaannya. Upaya ini ditujukan untuk memberikan dukungan selaras pada program yang saat ini sedang digagas oleh Dewan Pers, yaitu program keberlangsungan media.

3. Mendukung program pengembangan kompetensi penegak hukum dalam perspektif kemerdekaan pers melalui program pelatihan yang akan dikerjasamakan dengan stakeholder internasional dengan dukungan penghubung dari tim KWRIU Paris.
   Merujuk pada laporan Direktur Jenderal tentang Keselamatan Jurnalis dan Bahaya Impunitas, dan Rencana Aksi PBB tentang Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas, Nomor 19, poin h. Mendorong Negara Anggota untuk meningkatkan kapasitas lembaga pelatihan peradilan nasional, kejaksaan dan lembaga penegak hukum dan untuk mempertimbangkan penggunaan sumber daya pengetahuan yang ada pada UNESCO, dalam menangani impunitas dan keamanan jurnalis. Meskipun Indonesia belum menjadi negara anggota, upaya ini kemungkinan dapat diupayakan melalui loby jejaring KWRI Unesco Paris.

Jakarta, 2 Desember 2022
Pimpinan Delegasi Dewan Pers

M. Agung Dharmajaya
Plt. Ketua

Lampiran:
Dokumentasi Kegiatan:

Laporan Ketua Delegasi Dewan Pers dalam rencana menghadiri sidang IPDC ke 33 di Kantor Pusat UNESCO. Laporan diterima Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Prof. Ismunandar di Kantor KBRI Paris.

QATAR

Delegasi Dewan Pers hadir sebagai observer pada sesi ke *33, The Intergovernmental Council of The International Programme For The Development of Communication (IPDC),* yang diadakan dari 24 hingga 25 November 2022 di kantor pusat UNESCO

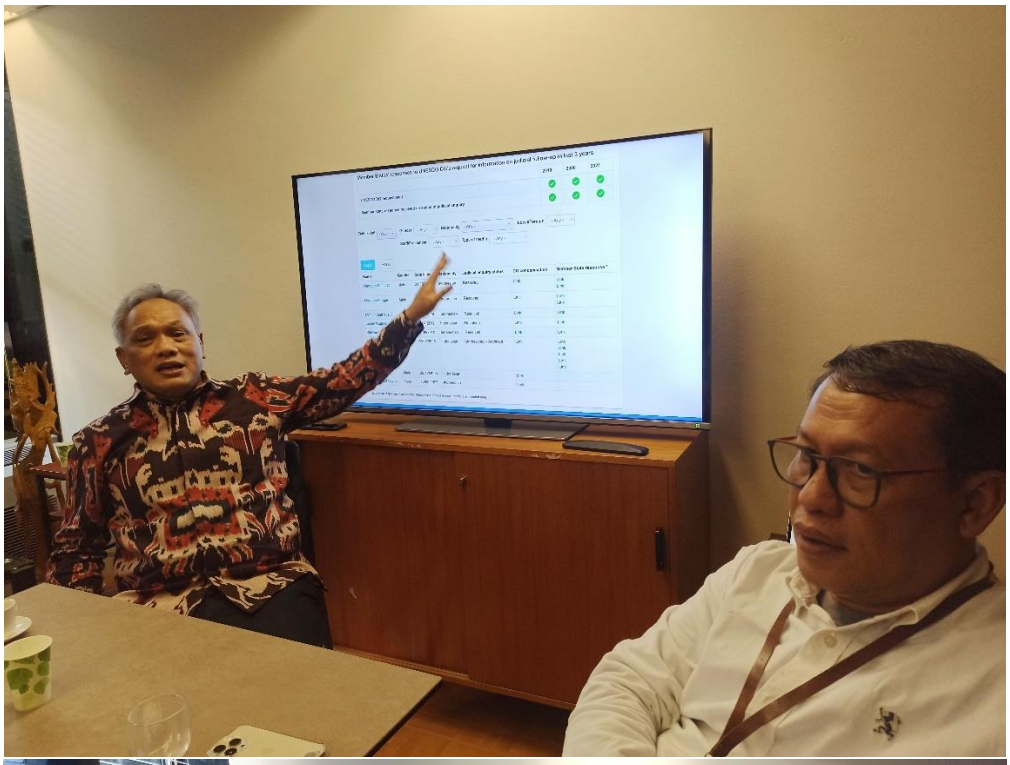

Delegasi Dewan Pers berdialog dengan Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Prof. Ismunandar di Kantor KBRI Paris dan tim antara lin membahas upaya yang perlu dilakukan dalam penuntasan kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia, bertampat di Kantor Perwakilan Tetap RI untuk UNESCO di Paris. Pada kesempatan yang sama, Plt Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya didampingi Ketua Komisi Pendidikan dan Penelitian Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyampaikan hasil survei Indeks kemerdekaan Pers Indonesia tahun 2022.